

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aspek kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan menjadi aspek penting dalam konsep pembangunan ekonomi suatu negara. Psacharopoulos (1987) menyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang positif terhadap pembangunan ekonomi. Kualitas pendidikan dapat ditingkatkan jika terdapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dan orang tua (Gustiana, 2012). Dukungan pemerintah tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pemerintah pusat atau daerah wajib menyediakan minimal 20% dari anggaran untuk sektor pendidikan. Pemerintah juga mulai merintis 12 tahun belajar untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Upaya pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari dukungan orang tua. Peran orang tua yaitu memberikan dukungan finansial dalam pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan. Pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan meliputi sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang untuk membeli buku sekolah, pakaian seragam dan uang badan pembantu penyelenggaraan pendidikan (BP3) (Syarief, 1997).

Penelitian mengenai pengeluaran pendidikan sangat terbatas (Tilak, 2002). Penelitian hanya berfokus pada pengeluaran orang tua pada investasi primer anak seperti pengeluaran untuk makanan, pakaian, rumah, transportasi dan kesehatan. Di

samping itu, hanya ada beberapa penelitian membahas investasi orang tua pada pendidikan tinggi anak (Olson, 1983; Steelman dan Polwell, 1991) sehingga analisis pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan perlu dilakukan.

Menurut BPS (2012), pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi konsumsi makanan dan bukan makanan. Konsumsi makanan terdiri dari jenis sayuran, buah-buahan, bahan minuman dan lainnya. Konsumsi bukan makanan terdiri dari beberapa kelompok, salah satunya kelompok barang dan jasa. Kelompok barang dan jasa dibagi menjadi beberapa sub kelompok, salah satunya pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan.

Pendidikan Indonesia masih memiliki kendala. Kendala tersebut berkaitan dengan mutu pendidikan yaitu keterbatasan akses pada pendidikan dan angka putus sekolah yang masih cukup tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *United Nation Education Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dan *United Nations Childrens Fund* (UNICEF) tahun 2011 menunjukkan 2,5 juta anak usia 7-15 tahun masih tidak bersekolah, di mana mereka putus sekolah saat masa transisi dari SD ke SMP.

Tabel 1.1

Perkembangan Siswa Tidak Melanjutkan Menurut Jenjang Pendidikan Indonesia Tahun 2007/2008-2011/2012 (dalam %)

Lulusan tidak melanjutkan	2007 /2008	2008 /2009	2009 /2010	2010 /2011	2011/ 2012
SD	10,54	3,80	10,76	10,15	18,34
SMP	13,66	7,20	10,52	10,20	6,83
SMA/SMK	35,65	43,13	45,81	49,38	51,59

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Tabel 1.1 menunjukkan presentase siswa menurut jenjang pendidikan yang tidak melanjutkan ke pendidikan berikutnya mulai tahun 2007/2008 sampai 2011/2012. Sejak tahun 2007/2008 hingga 2011/2012 presentase lulusan tidak melanjutkan dari jenjang SD hingga SMA mengalami kenaikan. Lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP setiap tahunnya lebih rendah dibanding lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA. Pada tahun 2011/2012, presentase lulusan SMA/SMK yang tidak melanjutkan terbesar selama kurun waktu 5 tahun tersebut yaitu sebesar 51,59%, artinya 48,41% lulusan yang melanjutkan ke pendidikan tinggi sedangkan tahun-tahun sebelumnya siswa tidak melanjutkan mengalami kenaikan dan penurunan.

Faktor yang menghalangi anak untuk mengakses pendidikan ke jenjang berikutnya adalah biaya sekolah dan bekerja. Menurut Data statistik, pendidikan tahun 2012 menunjukkan alasan penyebab anak usia 7-18 tahun tidak/belum pernah sekolah/tidak bersekolah lagi karena biaya sekolah sebesar 43,91% dan bekerja atau mencari nafkah sebesar 12,51%. Hal ini menunjukkan faktor ekonomi dalam hal ini biaya sekolah dan faktor sosial rumah tangga merupakan faktor pendorong keputusan sekolah untuk ke jenjang lebih tinggi lagi.

Biaya pendidikan yang terdapat di survei sosial ekonomi nasional (susenas) merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh penduduk yang masih bersekolah untuk proses penyelenggaraan pendidikan. Rata-rata biaya pendidikan per siswa selama bulan Januari–Juni 2012 adalah sebesar 929,13 ribu rupiah untuk pendidikan SD/MI, 1,53 juta rupiah untuk SMP/MTS, 2,48 juta rupiah untuk SMA/MA, dan 5,56 juta rupiah untuk jenjang pendidikan perguruan tinggi. Terlihat

biaya pendidikan yang di keluarkan rumah tangga masih cukup besar untuk setiap jenjang pendidikan. Hal ini menjadikan beban setiap rumah tangga dalam penyelenggaraan pendidikan anak.

Kemampuan ekonomi menjadi penyebab utama anak tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya, baik berupa kesulitan biaya sekolah maupun karena diharuskan membantu orang tua bekerja. Biaya sekolah siswa SD setengah dari pendapatan rumah tangga bagi mereka yang berada dibawah garis kemiskinan (Depdiknas, 2012). Kebutuhan seragam sekolah mencapai sepertiga dari total biaya untuk sekolah dasar di desa. Biaya sekolah tersebut bisa mencapai 20% dari pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan. Jika orang tua mampu membayar biaya-biaya tersebut, tekanan sosial untuk melakukan penyesuaian lingkungan sekolah (penampilan pakaian, kepemilikan dan display barang-barang konsumen) dapat mengakibatkan anak tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Tinggi rendahnya pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dapat dipengaruhi oleh karakteristik rumah tangga dan individu. Karakteristik rumah tangga antara lain pendidikan terakhir kepala rumah tangga, daerah tempat tinggal dan pendapatan sedangkan karakteristik individu meliputi usia dan jenis kelamin anak. Jadi diharapkan analisis berdasarkan data rumah tangga meliputi karakteristik rumah tangga dan individu dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai faktor penentu pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan (Tilak, 2002).

Pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan memiliki hubungan yang positif antara pendidikan terakhir orang tua (Glinskaya, 2005). Orang tua yang berpendidikan tinggi akan cenderung memperhatikan pendidikan untuk anak.

Mereka mengharapkan pendidikan anak yang lebih baik atau setara dengan pendidikan terakhirnya.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga non makanan meliputi pendidikan, rekreasi, olahraga antara kota dan desa (Kirdar dkk, 2012). Rumah tangga di desa cenderung mengeluarkan biaya pendidikan yang lebih tinggi karena aksesibilitas sarana yang sulit sehingga membutuhkan biaya yang relatif mahal daripada di kota (Kirdar dkk, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa daerah tempat tinggal dapat menyebabkan ketimpangan pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan.

Menurut Andreou (2012), karakteristik rumah tangga yaitu pendapatan memberikan efek yang kuat terhadap pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan. Pendapatan rumah tangga yang terbatas akan lebih banyak memenuhi kebutuhan makanan sedangkan rumah tangga yang berpendapatan relatif tinggi akan meningkatkan kebutuhan bukan makanan.

Kondisi pendapatan rumah tangga yang terbatas diperlukan pekerjaan dan tenaga yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini tidak cukup dengan tenaga ayah dan ibu saja. Orang tua tersebut membutuhkan tambahan orang untuk memebantu mereka bekerja. Hal ini mereka tidak mengambil pekerja dari orang luar yang sedang mencari pekerjaan, melainkan mereka mengambil tenaga dari anak-anak mereka. Hal tersebut kalau mereka mengambil tenaga dari luar keluarga maka diperlukan lagi dana untuk membayar upah, padahal kondisi keuangan rumah tangga yang terbatas.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 bahwa setiap warga negara

berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bahwa SD/MI wajib menerima warga negara usia 7-12 tahun sesuai dayaampungnya. Peraturan pemerintah yang mewajibkan usia masuk SD adalah 7 tahun tidak hanya dilaksanakan di Indonesia namun di beberapa negara seperti Switzerland.

Idealnya jika sesuai peraturan pemerintah maka peserta didik akan lulus SMA pada usia 19 tahun. Selama kurun waktu tersebut, penambahan usia anak seiring dengan naiknya tingkat pendidikan. Jenjang pendidikan yang semakin naik menyebabkan biaya pendidikan yang dikeluarkan rumah tangga bertambah besar (Zou dan Chen, 2010).

Pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan (Tilak, 2002). Hal ini karena anak perempuan memiliki *return to education* yang lebih rendah daripada anak laki-laki (Kingdon, 1998). Anak laki-laki memiliki produktifitas yang tinggi dan diharapkan memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada anak perempuan.

Menurut Andreou (2012), pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan di Cyprus dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan rumah tangga secara signifikan dipengaruhi pendapatan, jumlah anak, wilayah tempat tinggal, karakteristik kepala rumah tangga (pendidikan terakhir orang tua dan usia) dan karakteristik rumah (tipe rumah, jumlah kamar, sewa rumah, *second house*). Di sisi lain, pemerintah Cyprus dalam pengalokasian di

sektor pendidikan tetap menjadi perhatian utama, terbukti pengeluaran publik untuk pendidikan di Cyprus tertinggi di Uni Eropa.

Hal ini hampir serupa dengan pengeluaran publik untuk pendidikan di Indonesia. menurut Peraturan Pemerintah yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pemerintah pusat atau daerah wajib menyediakan minimal 20% dari anggaran untuk sektor pendidikan namun seperti diketahui angka tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya masih cukup tinggi. Hal ini ternyata sektor rumah tangga juga ikut adil dalam pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan. Sektor rumah tangga dengan karakteristik yang bervariasi menentukan besar kecilnya pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan sehingga secara tidak langsung berdampak pada penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, studi ini menganalisis pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan di Indonesia dengan menggunakan data mikro. Beberapa aspek terkait yaitu karakteristik rumah tangga dan individu dalam menentukan faktor yang mempengaruhi perbedaan pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan. Studi ini memfokuskan pada data rumah tangga tahun 2012. Penggunaan tahun 2012 karena setiap tahunnya (2010/2011) rumah tangga yang menjadi observasi berbeda sehingga hanya menggunakan kurun waktu satu tahun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dipengaruhi oleh karakteristik rumah tangga?

2. Apakah pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dipengaruhi oleh karakteristik individu?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik rumah tangga terhadap pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik individu terhadap pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan.

1.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran bagi pemerintah terkait realitas alokasi pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dan faktor yang mempengaruhinya di Indonesia.
2. Memberikan gambaran bagi pembaca dan akademisi terkait realitas alokasi pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dan faktor yang mempengaruhinya di Indonesia.

1.3. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bagian di mana pembahasannya saling terkait, yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memuat landasan teori, kerangka konsep, penelitian sebelumnya, serta hipotesis dan model analisis.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat gambaran umum kemiskinan dan profil kerentanan di Indonesia, deskripsi hasil uji empiris, analisis model dan pembuktian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini memuat simpulan hasil penelitian dan saran berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

Daftar Pustaka